



Dana Pilkada "Siap" Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19



□ Petrus Macarau.

Airmadidi, KOMENTAR

Dana yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang belum terpakai masih tersisa sekitar Rp 33 miliar. Pasalnya baru 40 persen dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang dicairkan ke penyelenggara dan pengawas Pilkada.

Dana tersebut menurut Kaban Keuangan Minut Petrus Macarau SE, Kamis (02/04) kemarin, bisa saja kemudian digunakan untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hanya saja, hal tersebut harus sesuai petunjuk pemerintah pusat.

"Sesuai arahan pemerintah pusat pemerintah daerah bisa menggunakan dana Pilkada 2020 yang belum dipakai. Dari Rp 40 miliar dana NPHD ke KPU Minut yang sudah dihi-

bah tahap pertama sebesar 40 persen yaitu Rp 16 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu Minut dari Rp 15 miliar sudah dihibah tahap pertama Rp 6 miliar. Jadi total masih ada Rp 33 miliar dana Pilkada yang belum dihibah dan belum terpakai," papar Macarau.

Saat ini lanjut dia, belum diketahui berapa dana yang sudah digunakan. "Laporan biasanya dimasukkan saat pencairan tahap kedua," kata Macarau. Ditegaskan Macarau, kendati pemerintah sudah mengarahkan bisa menggunakan anggaran pilkada itu, tetapi tentunya harus ada aturan dan petunjuk teknisnya, bukan sembarangan.

"Sampai saat ini aturan dan petunjuk teknisnya belum kami terima. Kami masih menunggu dari pusat," pungkas Macarau.^(vic)